

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan serta kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, termasuk untuk mengelola keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6), Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban tersebut, pemerintah daerah juga diberi kewenangan fiskal untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan yang memadai untuk memikul tanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Safitri, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah otonom karena pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2011). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan daerah merupakan salah satu kebutuhan pendanaan dalam upaya melaksanakan tanggung jawab otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menggali serta meningkatkan sumber pendapatan di daerahnya menjadi penentu utama dalam menjalankan otonomi daerah. Sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan Pajak Daerah.

Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut (Mustaqiem, 2008). Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini akan berfokus terhadap Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Tarifnya akan dikenakan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki, semakin besar pula tarif yang akan dikenakan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah hampir di semua provinsi di Indonesia. Hal ini menandakan betapa pentingnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini bagi daerah.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibukota kabupaten. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian (misalnya pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit). Hingga saat ini Sektor pertambangan masih jadi andalan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilansir dari laman belitung.tribunnews.com, disaat pandemi Covid-19, harga timah yang lumayan tinggi menjadi keuntungan tersendiri bagi para penambang timah Belitung. Tidak sedikit masyarakat beralih profesi menjadi penambang inkonvensional. Harga timah yang melambung ini membuat masyarakat mulai membeli kendaraan. Adanya peningkatan jumlah pembelian kendaraan ini membuat realisasi penerimaan pajak pada bulan september 2021 telah melebihi target. *Over target* pajak tersebut diperoleh dari peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dikarenakan daya beli masyarakat meningkat yaitu adanya peningkatan pembelian kendaraan bermotor.

Berdasarkan data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari laman bakuda.babelprov.go.id. Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang porsi paling besar di antara seluruh Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disusul oleh Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor di posisi kedua, Pajak rokok di posisi ketiga, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor diposisi keempat, dan di posisi terakhir yaitu Pajak Air Permukaan.

Tabel I.1 Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rupiah)

PAJAK DAERAH		2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor	226.373.483.345,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	92.523.064.703,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor	180.409.757.151,00
4	Pajak Air Permukaan	13.925.472.980,72
5	Pajak Rokok	100.384.044.744,00
JUMLAH		613.615.822.923,72

Sumber: Diolah penulis dari Bakuda.babelprov.go.id

Peningkatan yang terjadi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar efektifitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung. Penelitian ini akan penulis tuangkan melalui Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan penulis bahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung pada tahun 2018-2021?
2. Berapa besar kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung?
3. Berapa besar efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung pada tahun 2018-2021.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung.
3. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Target Penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Ruang Lingkup

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia. Namun, penulis membatasi ruang lingkup penulisan karya tulis tugas akhir ini pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Kabupaten Belitung. Data yang penulis gunakan untuk menulis merupakan data tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan fenomena yang penulis teliti terkait peningkatan populasi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Belitung yang menimbulkan potensi yang besar bagi Pendapatan Asli daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Karya Tulis Tingkat Akhir (KTTA) Tinjauan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung dapat memberi manfaat bagi penulis, Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Para pembaca yang membaca KTTA ini. Adapun manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir akan dirinci sebagaimana berikut:

1. Manfaat bagi penulis yaitu diharapkan dengan proses yang dilalui selama pembuatan KTTA ini menjadi sarana pembelajaran yang dapat membantu penulis lebih memahami mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu diharapkan bahwa KTTA ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru yang akan digunakan kedepannya.
3. Manfaat Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN diharapkan KTTA ini dapat digunakan bahan referensi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
4. Manfaat bagi para pembaca diharapkan dapat menambah bekal ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk memperluas wawasan mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, karya tulis ini dapat digunakan bahan referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan teori-teori para ahli dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian dan peraturan yang berlaku terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Mulai dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah secara luas kemudian mengerucut ke Pajak kendaraan bermotor yang menjadi fokus dari penelitian dalam KTTA ini. Bab ini juga akan membahas mengenai perhitungan kontribusi dan efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini dari beberapa subbab yang membahas mengenai gambaran umum subjek hingga objek penelitian, jenis penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan dan analisis data, serta sumber data yang nantinya akan diperoleh.. Penulis akan menuliskan secara lengkap dan detail mengenai bagaimana dan darimana penulis mendapatkan data-data baik primer maupun sekunder yang menjadi kebutuhan utama untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan berdasarkan data-data yang penulis peroleh untuk menjawab permasalahan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan. Simpulan tersebut akan menjawab rumusan masalah penelitian. Atas simpulan tersebut, penulis menyampaikan saran sebagai masukan bagi subjek yang diteliti dalam menerapkan penelitian ini.